

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI  
MELALUI *BILLING SYSTEM*  
(Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**BRILLIAN AR RAHMAAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI MELALUI BILLING SYSTEM (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

**Oleh**

**BRILLIAN AR RAHMAAN**

Pupuk bersubsidi merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Sebagai upaya ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung No. 99 tahun 2016 tentang pola distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung. Pola distribusi melalui *billing system* ini merupakan sistem distribusi pupuk bersubsidi secara *online*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan model implementasi kebijakan Goerge C. Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik. Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* masih ditemukan adanya kelemahan pada indikator tepat waktu terjadi keterlambatan waktu pengiriman pupuk bersubsidi.

Kata kunci: implementasi, *billing system*, pupuk bersubsidi.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF SUBSIDIZED FERTILIZER DISTRIBUTION POLICY THROUGH BILLING SYSTEM (Study in Gadingrejo District Pringsewu Regency)**

**By**

**BRILLIAN AR RAHMAAN**

Subsidized fertilizer is one of government policy to espouse increased agricultural production and productivity. As an attempt to provide subsidized fertilizer for farmers in accordance with six principles, that is the right type, quantity, price, place, time and quality. The Lampung Provincial Government has published Lampung Governor Regulation Number 99 of 2016 concert the distribution pattern of subsidized fertilizers in the agricultural sector in Lampung Province. The distribution pattern through this billing system is an online distribution system for subsidized fertilizers. The aim of this study was to decide the implementation of subsidized fertilizer distribution policies through a billing system in Gadingrejo District, Pringsewu Regency. The type of research used in this research is descriptive with a qualitative approach. Using George C. Edward III policy implementation model. The results of this study indicate that the implementation of the subsidized fertilizer distribution policy through the billing system in Gadingrejo District, Pringsewu Regency in terms of communication, resources, disposition, and bureaucracy structure has been going so worth. In the implementation of the distribution of subsidized fertilizers through the billing system, it is still found that there are weaknesses in the timely indicators of delays in the delivery of subsidized fertilizers.

Key word: implementation, billing system, subsidized fertilizer

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI  
MELALUI *BILLING SYSTEM*  
(Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

Oleh

**BRILLIAN AR RAHMAAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI MELALUI *BILLING SYSTEM* (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

Nama Mahasiswa

: ***Brilliant Ar Rahmaan***

No. Pokok Mahasiswa

: **1416021027**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**  
NIP. 195707281987031006

  
**Kris Ari Suryandari, S.IP., M.IP.**  
NIP. 231610900918201

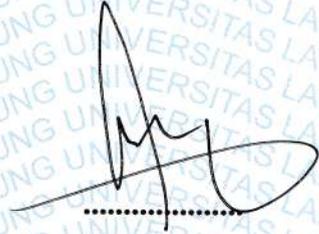
**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP. 196112181989021001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**



Sekretaris : **Kris Ari Suryandari, S.IP., M.IP.**

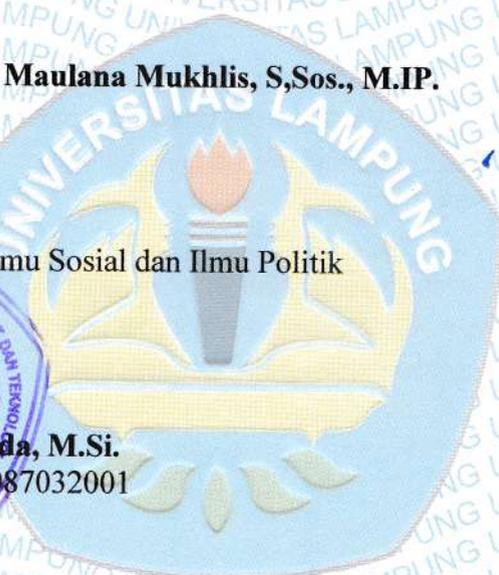


Penguji : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian: **29 Juli 2021**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Juli 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Brilliant Ar Rahmaan  
NPM. 1416021027

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Brillian Ar Rahmaan, dilahirkan di Kotabumi pada 04 Desember 1996. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putra dari Bapak H. Suwito, BBA dan Ibu Hj. Citra Dewi, S.Pd. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2001-2002 di TK Kemala Bhayangkari Kotabumi, dilanjutkan di SD Xaverius Kotabumi pada tahun 2002-2008. Penulis pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kotabumi tahun 2008-2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kotabumi tahun 2011-2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

## **MOTTO**

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dan sesungguhnya  
bersama kesulitan ada kemudahan  
(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“Janganlah engkau berputus asa karena putus asa itu bukanlah akhlak seorang muslim. Ketahuilah bahwa kenyataan hari ini adalah mimpi hari kemarin dan impian hari ini adalah kenyataan hari esok”  
(Imam Hassan Al-Banna)

“Karena rezeki telah dibagi dan urusan telah diatur, maka jangan pernah bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan”  
(Brilliant Ar Rahman)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmannirrahim

Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya dalam setiap langkah Penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dengan rasa cinta dan hormat, skripsi ini dipersembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta serta Kakak-kakakku yang kusayangi .  
Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

*Alhamdullillahirabbil'alamin....* Segenap puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, karya ilmiah dengan judul, **“Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui *Billing System* (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”** dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Pembimbing Utama terima kasih atas ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penulis. Terima kasih telah banyak membantu dan bersedia membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keikhlasan dan ketulusan bapak dalam membimbing mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
4. Ibu Kris Ari Suryandari, S.IP, M.IP. selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas kesabaran untuk meluangkan waktu dalam menghadapi Penulis, atas segala bimbingan ilmu, saran yang sangat bermanfaat serta motivasi, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Ibu selalu

diberikan kesehatan dan semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk ibu.

5. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos. M.IP. selaku Pembahas Skripsi, terima kasih atas segala kritik dan saran terhadap skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ini yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak.
6. Dosen – Dosen Khususnya Dosen Ilmu Pemerintahan dan staf – staf nya atas kebaikan, pembelajaran serta ilmunya dalam memberikan pendidikan kepada penulis.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayah H. Suwito, BBA. dan Ibu Hj. Citra Dewi, S.Pd. yang tak pernah letih memberikan semangat, dorongan doa serta didikan selama ini serta mengupayakan yang terbaik bagi bekal kesuksesan masa depan anak – anaknya. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayangnya serta balasan atas segala jasa ayahanda dan ibunda selama ini.
8. Kakak-kakak kandungku A.Bangkit Satya, S.IP., Arqo Suci Nurhalussia, S.ST., dan Annisaa Siti Zulaicha, S.Pd., M.Si. Terima kasih atas peran, doa dan dukungan yang kalian berikan selama ini.
9. Saudara seperjuangan Ilmu Pemerintahan Unila 2014 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk segala kenangan, kebersamaan dan bantuan selama ini. Sukses untuk kita semua.
10. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) di desa Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atas partisipasi dan kerjasamanya sehingga penulis mampu menyelesaikan KKN tersebut.

Bandar Lampung, 29 Juli 2021

Penulis  
Brilliant Ar Rahmaan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan.....	14
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	14
2. Model Implementasi Kebijakan.....	18
a. Model Top-down Approach.....	18
b. Model Van Meter dan Van Horn.....	19
c. Model Daniel A. Mazmanian dan Sabatier.....	20
d. Model George C. Edwards III .....	21
B. Tinjauan Tentang Distribusi.....	26
C. Kerangka Pikir.....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	<b>36</b>
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Informan.....	38
D. Jenis Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Pengolahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	49

<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu.....	50
2. Gambaran Umum Kecamatan Gadingrejo.....	55
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Komunikasi.....	59
B. Sumber Daya.....	67
C. Disposisi.....	71
D. Struktur Birokrasi.....	75
<b>VI. PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Alokasi Pupuk Bersubsidi.....	4
2. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018.....	8
3. Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kecamatan Gadingrejo Tahun 2018.....	9
4. Penelitian Terdahulu.....	10
5. Informan.....	39
6. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pringsewu.....	54
7. Luas Kecamatan Gadingrejo menurut Pekon.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Alur Sistem <i>Billing</i> .....	6
2. Kerangka Pikir.....	35
3. Sosialisasi dan penyampaian informasi teknis.....	64

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan struktural dalam bidang sosial dan ekonomi. Proses perubahan tersebut merupakan suatu proses yang dinamis dan menuju yang lebih baik dari suatu tahap ke tahap berikutnya yang berorientasi kepada bagaimana memenuhi kebutuhan pokok. Salah satu kebutuhan pokok itu adalah pangan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling utama.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan wilayah yang sangat luas, ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun kemiskinan yang merupakan masalah pokok nasional mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang konsisten dalam sektor pertanian akan mendukung pembangunan pertanian salah satunya dalam produktivitas padi. Upaya pemerintah tersebut dapat mendukung swasembada beras dalam komoditas

pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (Harris Hasyim, 2005:3).

Peran sektor pertanian dapat dilihat secara lebih komprehensif, antara lain: (1) sebagai penyediaan pangan masyarakat sehingga mampu berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (*food security*), (2) sektor pertanian menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa (3) sektor pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau produk substitusi impor, (4) sektor pertanian merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri, dan (5) sektor pertanian mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain (Daryanto, 2014:1).

Peningkatan kinerja sektor pertanian tidak lepas dari kondisi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi ini dalam jumlah yang relative mencukupi kebutuhan dengan diimbangi harga yang terjangkau oleh kalangan penggunaan pupuk. Hal inilah yang mendasari pemerintah memberlakukan subsidi pupuk bagi petani (Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2004).

Keterlibatan peran pemerintah dalam pembangunan disektor pertanian ini sangat dibutuhkan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang hasil tanaman pangan. Selain itu perlunya pemerintah

membuat suatu kebijakan dan kemudian mengimplementasikannya agar pembangunan dan pengembangan di sektor pertanian ini dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan publik dibuat oleh aparatur pemerintah untuk mengatur mengelola, dan mengembangkan sebuah keterkaitan terhadap masyarakat dengan upaya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara yang efektif. Seperti yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Tahir, 2015:45) menjelaskan kebijakan sebagai tindakan yang didesain secara sengaja, relatif stabil dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama, dengan melakukan adopsi dari kebijakan sebelumnya untuk diperbaiki dan dapat dijalankan dalam bentuk kebijakan yang baru.

Subsidi adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk membeli suatu barang atau jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Kebijakan subsidi pupuk ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah agar mampu meringankan beban bagi petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha taninya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan produktivitas usaha tani. Oleh karena itu sejarah keberhasilan penyediaan

pangan, terutama beras, banyak ditentukan oleh keberadaan pupuk. Pentingnya peranan pupuk dalam sistem produksi pertanian menjadikan pemerintah selalu memberikan perhatian serius serta mengeluarkan kebijakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi, bahwa tujuan kebijakan pada dasarnya adalah memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhannya dengan harga yang terjangkau sehingga produktivitas usaha taninya dapat meningkat (Darwis dan Nurmanaf, 2014:71).

Sejak 2015 hingga 2018 alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung selalu tertinggi di Sumatera, dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Alokasi Pupuk Bersubsidi**

Provinsi	Jumlah Alokasi			
	2015	2016	2017	2018
<b>Lampung</b>	<b>484.100 ton</b>	<b>530.070 ton</b>	<b>484.100 ton</b>	<b>502.480 ton</b>
Sumatera Utara	434.050 ton	457.270 ton	434.040 ton	482.880 ton
Sumatera Selatan	346.450 ton	360.990 ton	346.450 ton	320.140 ton

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Lampung tahun 2018

Besaran alokasi pupuk bersubsidi dan besarnya kebutuhan terhadap pupuk membuat penyaluran pupuk menjadi incaran oknum untuk diselewengkan. “Para petani mengeluhkan sering terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, dan harga pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, di antaranya pupuk urea Rp.110.000/sak (50 kg),

kemudian SP36 Rp.150.000/sak. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian, HET pupuk bersubsidi jenis urea Rp.90.000/sak (50 kg), SP36 Rp. 100.000/sak (50 kg), dan ZA Rp.70.000/sak (50 kg)”.<sup>1</sup>

Melihat dari problematika diatas Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 99 tahun 2016 Tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung. Pola distribusi melalui *Billing System* ini merupakan terobosan dari Provinsi Lampung dan menjadi pertama di Indonesia. *Billing System* merupakan sistem distribusi pupuk bersubsidi secara *online*.

Petani yang telah tergabung dalam dalam kelompok tani mengajukan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), mulai dari tingkat kelompok tani, tingkat desa/pekon, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi selanjutnya untuk dilakukan penyesuaian dengan alokasi yang ada, karena adanya keterbatasan pemerintah dalam penyediaan alokasi pupuk bersubsidi.

Data tersebut yang akan dimasukan ke dalam sistem melalui *website* [www.pupuklampung.com](http://www.pupuklampung.com) dan [www.pupuklampung.co.id](http://www.pupuklampung.co.id) yang akan menjadi acuan untuk kelompok tani bisa menebus pupuk, distributor dan kios atau pengecer sebagai penyalur pupuk. Semua transaksi pembayaran melalui bank dalam hal ini bekerja sama dengan Bank Lampung. Untuk lebih jelasnya alur distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

---

<sup>1</sup> Lampung.antaranews.com, diakses pada tanggal 28 April 2018



**Gambar 1. Bagan Alur Sistem Billing**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung tahun 2018

Keuntungan sistem ini bagi petani antara lain pupuk yang diterima sesuai dengan enam prinsip yaitu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, dan tepat waktu. Kemudian, harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani, sedangkan untuk distributor dan pengecer dapat mempermudah pencatatan dan tertib pelaporan (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung).

Hal senada dengan pernyataan Edi Yanto Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang di kutip dari [republika.co.id](http://republika.co.id) :

Menurutnya, setiap daerah sudah wajib menggunakan *billing* untuk mempermudah pendistribusian pupuk kepada masyarakat petani yang telah mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Namun demikian, hingga saat ini baru beberapa kabupaten yang sudah menerapkan sistem daring yakni Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pringsewu dan Kota Metro.

"Semua kabupaten/kota harus bisa menggunakan sistem '*online*', agar tidak tertinggal dari kabupaten lainnya. Bila belum menggunakan '*online*' masih sangat rawan penyelewengan pupuk. Dengan sistem ini sangat kecil untuk terjadinya

penyelewengan tersebut,".Sistem daring ini sudah diterapkan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 99 tahun 2016 tentang pola distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung.

Keuntungan sistem ini bagi petani antara lain pupuk yang diterima sesuai dengan enam prinsip yaitu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, dan tepat waktu. Kemudian, harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani, sedangkan untuk distributor dan pengecer dapat mempermudah pencatatan dan tertib pelaporan.<sup>2</sup>

Program ini pada 6 Mei 2016 diuji coba di satu Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Terobosan ini diminati banyak petani, hingga September 2016 penyaluran pupuk secara online mencapai 626,18 kilogram urea, 509,16 kilogram NPK, 26,51 kilogram SP-36, dan 13,2 kilogram pupuk organik, dengan total tebusan Rp. 2,5 miliar. Hingga tahun 2017 baru beberapa kabupaten yang sudah menerapkan *billing system* yakni Kabupaten Lampung Selatan di 5 kecamatan, Lampung Timur 1 kecamatan, Lampung Tengah 1 kecamatan, Tanggamus 1 kecamatan, Kota Metro 5 kecamatan, dan Pringsewu 1 kecamatan.

*Billing system* pada pelaksanaannya masih sarat akan masalah-masalah yang terjadi dilapangan, masalah yang paling utama adalah terlambatnya pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor ke kios atau pengecer, seperti dikutip dari berita24.id:

Menurut salah seorang petani yang tergabung dalam kelompok tani Warsid Umar, menyatakan bahwa petani mengeluhkan terlambatnya pengiriman pupuk bersubsidi disejumlah kios. Sehingga petani khawatir keterlambatan tersebut akan berdampak pada tanaman mereka.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Republika.co.id, diakses pada tanggal 28 April 2018

<sup>3</sup> Berita24.id, diakses pada tanggal 28 Januari 2019

Diantara kabupaten dan kecamatan yang telah melaksanakan pola distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* peneliti tertarik meneliti Kabupaten Pringsewu Kecamatan Gadingrejo karena Kabupaten Pringsewu memiliki potensi besar di bidang pertanian, untuk tanaman pangan dan hortikultura memiliki lahan seluas 36.849 Ha (hektar) yang menjadi lahan sawah seluas 20.616 Ha. Untuk kecamatan Gadingrejo memiliki luas lahan 6.966,83 Ha, mayoritas luas lahan yaitu 50,65 persen dari total luas lahan merupakan lahan sawah. Karena hal tersebut maka kebutuhan pupuk bersubsidi untuk menopang sektor pertanian menjadi sangat penting.

Tahun 2018 jumlah alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan usulan RDKK masih belum mencukupi. Untuk urea hanya 79,94 %, SP36 32,89 %, NPK 62,04 %, ZA 18,26 %, dan pupuk organik 11,39 %. Seperti data dibawah ini jumlah alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Pringsewu dan RDKK Kecamatan Gadingrejo tahun 2018:

**Tabel 2. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018**

No	Alokasi	Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	SP36	ZA	NPK	Organik
1	Provinsi Lampung	257.790	45.150	17.980	153.140	28.420
2	Kabupaten Pringsewu	8.350	1.547	607	5.091	800
3	Kecamatan Gadingrejo	1227	248	9	448	7

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

**Tabel 3. Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kecamatan Gadingrejo tahun 2018**

No	Desa	Pok tan	Jenis Pupuk (Ton)				
			Urea	SP36	ZA	NPK	Organik
1	Gadingrejo	4	91,65	91,65	-	91,65	-
2	Gadingrejo Utara	4	90,55	90,55	-	90,55	16,25
3	Gadingrejo Timur	3	44,7	44,7	-	44,7	-
4	Wates	4	81	40,5	-	81	-
5	Wates Timur	4	73,2	36,6	6,6	73,2	15,84
6	Wates Selatan	3	2,1	1,05	-	2,1	-
7	Wonodadi	6	153,54	76,77	18,7	153,54	109,11
8	Wonodadi Utara	3	37,7	18,92	14,9	41,85	27,42
9	Wonosari	5	98,47	49,23	-	98,47	-
10	Bulurejo	9	130,5	65,25	30,9	195,75	-
11	Klaten	3	48	32	-	72	-
12	Tegalsari	7	356,4	178,2	-	365,95	220
13	Tulung Agung	8	153	30,87	-	86,10	-
14	Pararejo	7	120	126	-	126	-
15	Yogyakarta	8	138,9	69,45	-	208,35	-
16	Yogyakarta Selatan	3	40,2	20,1	-	60,3	-
17	Tambahrejo	6	110,62	44,25	-	105,75	-
18	Tambahrejo Barat	3	29,7	13,2	-	23,85	-
19	Blitarejo	5	108,6	108,6	-	108,6	-
20	Kediri	4	50,1	50,1	-	50,1	-
21	Mataram	7	124,35	62,17	-	124,35	-
22	Bulukarto	7	142,8	142,8	-	142,8	-
23	Panjirejo	3	69	69	-	69	-
<b>Total</b>		<b>116</b>	<b>2142,09</b>	<b>1461,98</b>	<b>70,5</b>	<b>2415,98</b>	<b>388,62</b>

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Gadingrejo tahun 2018

Untuk Kabupaten Pringsewu sistem distribusi pupuk bersubsidi secara online atau *billing system* ini memang masih sangat baru diterapkan di Kecamatan Gadingrejo yang dijadikan pusat percontohan untuk penerapan *billing system* di Kabupaten Pringsewu. Hal ini di terapkan untuk

meminimalisir permasalahan tentang distribusi pupuk bersubsidi yang sangat riskan dan rentan terjadi.

Berdasarkan hasil pra-riset tanggal 25 Oktober 2018 menurut Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) Kecamatan Gadingrejo pola distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* pada pelaksanaannya memiliki beberapa masalah-masalah dilapangan, seperti terjadi keterlambatan distributor mengirim pupuk bersubsidi sesuai pesanan poktan (kelompok tani) pada pengecer yang dituju yaitu maksimal tiga hari setelah tanggal pembayaran oleh poktan, dan masih lemahnya skill dalam penggunaan internet bagi petani.

Berdasarkan dengan penelitian ini maka peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 4. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1.	Yuni Asih Gustriani	2018	Skripsi	Implementasi Program Subsidi Langsung Pupuk (SPL) bagi Petani di Kecamatan Sekarbla Kota Mataram
2.	Fajarmulia	2016	Skripsi	Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember

3.	Riyan Saputra	2016	Skripsi	Implementasi Program Pendamping Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (di Desa Bukit Kecamatan Pelaman Kabupaten Sorolagun Provinsi Jambi
4.	Erlin Citraningsih	2015	Skripsi	Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pola Tertutup pada Lini IV di Kelompok Tana Sumber Rejeki, Desa Glundongan Kabupaten Jember
5.	Endro Gunawan	2016	Skripsi	Presepsi Petani dalam Implementasi Program Kartu Tani untuk Mendukung Distribui Pupuk Bersubsidi

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2018

Peneliti pertama dan kedua fokus penelitiannya pada implementasi kebijakan distribusi pupuk secara langsung menggunakan metode kualitatif. Peneliti ketiga berfokus pada implementasi program pendamping desa dalam meningkatkan ketahanan pangan. Peneliti keempat fokus penelitiannya implementasi kebijakan distribusi pupuk dengan pola tertutup. Peneliti kelima berfokus pada presepsi petani terhadap implementasi kartu tani.

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui *Billing System* di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”. Peneliti juga akan melihat dalam hal tepat jumlah, tempat, jenis, harga, mutu, dan waktu distribusi pupuk bersubsidi dengan melihat beberapa variabel-

variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dapat menentukan keberhasilan dari implementasi *billing system*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui *Billing System* (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui *Billing System* (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah serta memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan didalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.

### 2. Secara praktis

- Sebagai sumber rujukan bagi pemerintah daerah mengenai implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, sehingga pemerintah dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan.

- Sebagai bahan referensi masyarakat yang ingin mengkaji tentang implementasi kebijakan penyediaan pupuk di Kabupaten Pringsewu.
- Dapat menambah wawasan mengenai kebijakan *billing system* serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan**

#### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Abdul Wahab (dalam Tahir, 2015:55) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan pemerintah. Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*publicservice*). Implementasi kebijakan merupakan prosedur yang relatif kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan implementasi kebijakan

sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya; pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan dan perilaku sasaran. (Suharno, 2013:169)

Adapun pendekatan dalam implementasi kebijakan publik antara lain:

#### 1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan maka perlu dilakukan *Planning of change* dan *Planning for change*.

#### 2. Pendekatan Prosedural/Manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique*).

#### 3. Pendekatan Kewajiban/Behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

#### 4. Pendekatan Politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi (Mulyadi, 2015:25-26).

Proses implementasi selama ini lebih banyak memberikan peran kepada aktor-aktor negara, khususnya aparatur pemerintah. Hal ini membuat proses implementasi kebijakan seringkali dimaknai sebagai proses administratif semata. Proses implementasi dianggap sebagai proses yang steril dan terpisah dari hiruk pikuk politik proses pengambilan keputusan dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa selalu ada kesenjangan antara tujuan yang dinyatakan dalam *policy statement* dengan *outcome* yang dihasilkan dari *policy implementation* membuat sebagian analis mulai menelaah '*missing-link*' dalam analisis implementasi kebijakan yang selama ini dilakukan.

Sejak saat itu, analisis implementasi kebijakan mulai bergerak lebih jauh lagi dari pada sekedar memandangi proses implementasi kebijakan sebagai proses administratif semata. Analis mulai mencoba menemukan dan memetakan bagaimana proses implementasi kebijakan memiliki dinamikanya sendiri dan dinamika ini mempengaruhi *outcome* dari kebijakan yang diimplementasikan.

Van Meter dan Horn (dalam Budi Winarno, 2005:102) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan

operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Implementasi kebijakan publik menurut pendapat Anderson (dalam Hariyoso, 2002:143) esensinya berkaitan dengan aktivitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengena pada sasaran. Sedangkan menurut Griendle (dalam Hariyoso, 2002:148) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politis dan administratif.

Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program itu dirumuskan, yaitu peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu kepada masyarakat.

Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai implementasi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang secara langsung atau

tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut.

## **2. Model Implementasi Kebijakan**

### *a. Model Top-down Approach*

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Tahir, 2015:82), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan tertentu, yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius, jika berada di luar kendali implementator (dapat bersifat politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain);
2. Untuk pelaksanaan program, tersedianya waktu dan sumber daya yang cukup memadai;
3. Perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal;
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan ketergantungan harus kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;

8. Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2013:99), ada beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan menimbulkan konflik di antara para agen implementasi;
2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*);
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program;
4. Karakteristik agen pelaksana, yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi

dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program;

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan;
6. Sikap/disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kongnisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni prioritas nilai yang dimiliki oleh implementor.

c. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Tahir, 2015:77), implementasi kebijakan berdasarkan model pendekatan sentralistis akan menjadi efektif apabila memenuhi enam syarat, yaitu:

1. Adanya tujuan yang jelas dan konsiten;
2. Memiliki teori kausal yang memadai tentang bagaimana cara melahirkan perubahan;
3. Mempunyai struktur implementasi yang disusun secara legal;
4. Para pelaksana implementasi yang memiliki keahlian dan komitmen;
5. Adanya dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa;
6. Adanya perubahan dalam kondisi sosial-ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa.

d. Model George C. Edwards III (1980)

Menurut George C. Edwards III (dalam Subarsono, 2013:90) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), SumberDaya (*Resources*), sikap (*Dispositions* atau *Attitudes*) dan struktur birokrasi (*Bureucraticstructure*). Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan saran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok, sasaran (*target group*) sehingga akan

mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan menjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebar luaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah

melihat tidak jelas spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

## 2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan

program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik, jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan *skill*/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program, untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

### 3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk

merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran keberhasilan program.

#### 4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

Variabel-variabel kebijakan berkaitan dengan tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik formal maupun

informal, sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.

Beberapa ahli menempatkan tahanan implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

## **B. Tinjauan Tentang Distribusi**

Menurut Kotler (2007:120), dalam kehidupan perekonomian terdapat 3 (tiga) kelompok aktivitas yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Aktivitas yang terakhir yaitu distribusi adalah kegiatan yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen

dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik.

Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat didalamnya, yaitu :

1. Lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*Channel of distribution* Atau *marketing channel*).
2. Aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*Physical distribution*).

#### 1. Saluran Distribusi

Kotler (2007:122) mengemukakan bahwa saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu pedagang perantara dan agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.

- Pedagang perantara

Pada dasarnya, pedagang perantara (*merchant middleman*) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu ; pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.

- Agen perantara

Agen perantara (*Agent middle man*) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang ditangani, yang dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu :

1. Agen Penunjang: Agen pembelian dan penjualan - Agen Pengangkutan - Agen Penyimpanan
2. Agen Pelengkap: Agen yang membantu dalam bidang finansial - Agen yang membantu dalam bidang keputusan - Agen yang dapat memberikan informasi - Agen khusus

Terdapat tiga fungsi saluran distribusi sebagai berikut :

1. Fungsi pertukaran
2. Fungsi Penyediaan Fisik
3. Fungsi Penunjang

Dalam masing-masing fungsi saluran distribusi diatas diperlukan adanya transaksi antara dua pihak atau lebih, menyangkut pemindahan barang-barang secara fisik dari produsen sampai kepada konsumen, serta bersifat membantu untuk pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya. Ketiga fungsi saluran tersebut harus saling mendukung demi kelancaran proses saluran pendistribusian barang dalam perusahaan.

Ada beberapa alternatif saluran (tipe saluran) yang dapat dipakai. Biasanya alternatif saluran tersebut didasarkan pada golongan barang konsumsi dan barang industri.

1. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dibeli untuk dikonsumsi. Pembeliannya didasarkan atas kebiasaan membeli dari konsumen. Jadi, pembelinya adalah pembeli atau konsumen akhir, bukan pemakai industri karena barang –barang tersebut tidak diproses lagi, melainkan dipakai sendiri.
2. Barang industri adalah barang-barang yang dibeli untuk diproses lagi atau untuk kepentingan dalam industri. Jadi, pembeli barang industri ini adalah perusahaan, lembaga, atau organisasi, termasuk non laba.

Dibawah ini beberapa tipe saluran untuk barang konsumsi dan barang industri:

- a. Tipe saluran untuk barang konsumsi

Saluran 1 : Produsen - Konsumen

Saluran 2 : Produsen - Pedagang eceran - Konsumen

Saluran 3 : Produsen - Grosir - Pedagang eceran - Konsumen

Saluran 4 : Produsen - Agen - Grosir - Pedagang eceran - Konsumen

b. Tipe saluran untuk barang industri

Saluran 1 : Produsen - Pemakai industri

Saluran 2 : Produsen - Distributor industri - Pemakai industri

Saluran 3 : Produsen - Agen - Distributor industri - Pemakai industri

Saluran 4 : Produsen - Agen - Pemakai industri

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan didalam memilih saluran distribusi, faktor tersebut antara lain :

1. Jenis barang yang dipasarkan
2. Produsennya
3. Penyalur yang bersedia ikut mengambil bagian
4. Pasar sasaran

2. Distribusi Fisik

Distribusi fisik merupakan aspek penting kedua dalam rangka menjadikan suatu produk tersedia bagi konsumen dalam jumlah, waktu, dan tempat yang tepat. Dalam hubungan itu, Dewan Manajemen Distribusi Fisik Nasional Amerika Serikat mendefinisikan distribusi fisik sebagai berikut : “ Suatu rangkaian aktivitas yang luas mengenai pemindahan barang jadi secara efisien dari akhir batas produksi kepada konsumen, serta didalam beberapa hal mencakup pemindahan bahan mentah dari suatu pembekal keawal batas produksi” (Kotler, 2007:125).

Manajemen distribusi fisik hanyalah satu diantara istilah deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan suatu pengendalian atas pemindahan barang seperti didefinisikan di muka. Hal ini sering pula diistilahkan sebagai manajemen logistik atau logistik pemasaran. Secara terperinci, kegiatan yang ada dalam kegiatan distribusi fisik dapat dibagi kedalam lima macam yaitu :

1. Penentuan lokasi persediaan dan sistem penyimpanannya

- a. Penentuan lokasi penyediaannya

Kebijaksanaan terhadap lokasi persediaan didasarkan pada strategi yang diinginkan, apakah secara memusat (konsentrasi) ataukah menyebar (dispersi) di pasarnya. Jika perusahaan mengkonsentrasikan persediaannya, maka akan memudahkan dalam mengadakan pengawasan. Selain itu, juga akan meningkatkan efisiensi penyimpanan dan penanganan barangnya. Namun dari segi lain dapat terjadi bahwa beban pengangkutan akan meningkat dan pengantaran barang ke beberapa segmen pasar akan terlambat. Selanjutnya jika perusahaan menyebarkan persediaannya ke beberapa lokasi, maka keadaannya akan berlainan, dan merupakan kebalikan dari konsentrasi.

- b. Sistem penyimpanan persediaan

Penyimpanan erat kaitannya dengan pergudangan, biasanya perusahaan yang tidak mempunyai fasilitas penyimpan sendiri umumnya menyewa kepada lembaga atau perusahaan lain atau

disebut gudang umum. Besarnya sewa yang harus dibayar ditentukan menurut besarnya ruangan yang digunakan.

c. Sistem penanganan barang

Sistem penanganan barang yang dapat digunakan antara lain :

- Paletisasi.

Dalam paletisasi, penanganan barang-barang baik itu berupa bahan baku maupun barang jadi dipakai suatu alat yang disebut palet. Melalui alat ini barang-barang dapat dipindahkan secara cepat. Penggunaannya akan lebih ekonomis apabila material yang ditangani jumlahnya besar.

- Pengemasan

Barang-barang yang ditangani ditempatkan dalam suatu kemasan atau peti kemas baik dari logam, kayu, ataupun bahan yang lain. Biasanya kemasan ini dibuat dalam ukuran-ukuran tertentu sehingga sangat mudah dalam pengangkutannya.

- Sistem pengawasan persediaan

Faktor penting yang lain dalam sistem distribusi fisik adalah mengadakan pengawasan secara efektif terhadap komposisi dan besarnya persediaan. Tujuan dari pengawasan persediaan adalah meminimumkan jumlah persediaan yang diperlukan, dan meminimumkan fluktuasi

dalam persediaan sambil melayani pesanan dari pembeli. Besarnya persediaan sangat ditentukan oleh keseimbangan kebutuhan pasar dengan faktor biaya. Sedangkan permintaan pasar dapat diukur dengan menggunakan analisis ramalan penjualan.

- Prosedur memproses pesanan

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk memproses pesanan antara lain: menyelenggarakan kegiatan kantor secara teratur, membuat barang dengan baik, serta menyampaikannya kepada pembeli. Jika perusahaan tidak sanggup atau tidak mampu melaksanakan pesanan, maka ia harus memberitahu kepada pembeli.

- Pemilihan metode pengangkutan

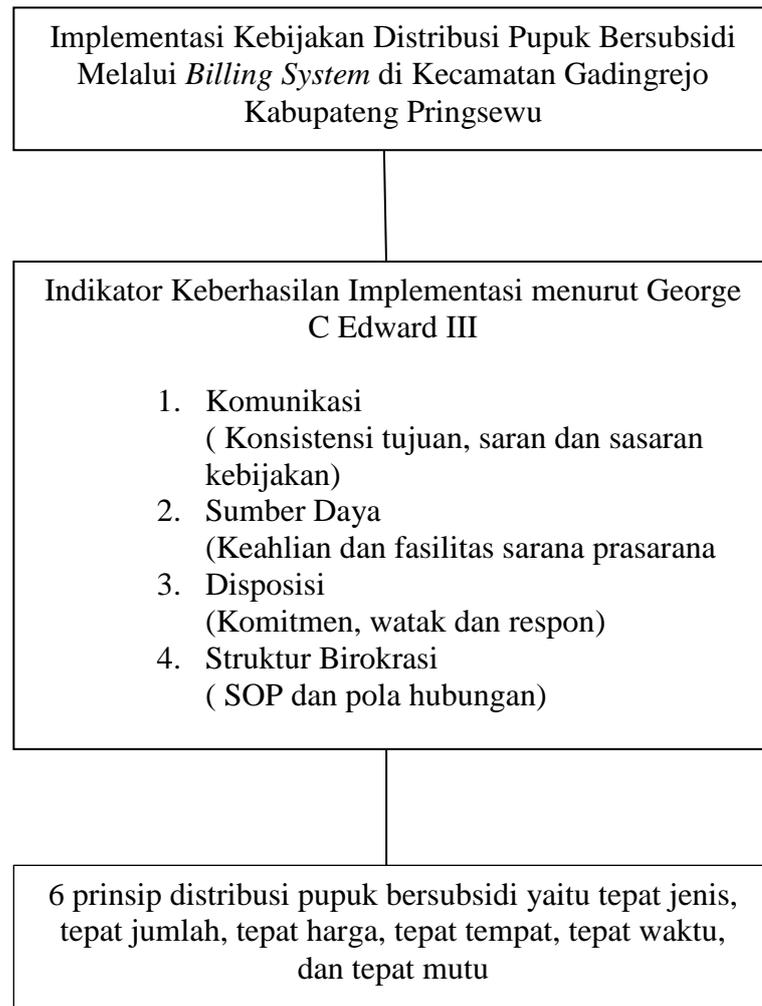
Dalam hal ini, rute dan rit pengangkutan merupakan faktor yang penting, dan mempunyai hubungan yang erat dengan pasar atau daerah penjualan, serta lokasi persediaannya. Selain itu fasilitas pengangkutan yang ada juga merupakan faktor penentu.

### C. Kerangka Pikir

Peningkatan kinerja sektor pertanian tidak lepas dari kondisi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk dipasar baik dari segi kuantitas, kualitas dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dapat dijamin oleh pemerintah. Hal inilah yang mendasari pemerintah memberlakukan subsidi pupuk bagi petani.

Provinsi Lampung termasuk yang terbesar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Besarnya alokasi membuat penyaluran pupuk menjadi incaran oknum untuk diselewengkan. Dalam mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung mengatur pola distribusi pupuk bersubsidi melalui Peraturan Gubernur Nomor 99 tahun 2016. Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu merupakan kecamatan yang telah menerapkan kebijakan ini.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka pada penelitian ini peneliti akan menganalisis fenomena yang ada di Kecamatan Gadingrejo dengan menggunakan model implementasi Goerge C Edward III, dikarenakan keempat variabelnya beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintang implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Untuk lebih jelasnya gambar kerangka pikir dapat dilihat pada bagan berikut ini:



**Gambar 2. Kerangka Pikir**

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2018

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Untuk mengetahui implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Fuad dan Nugroho (2014:54) yakni suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Penelitian kualitatif didefinisikan Ghony dan Almanshur (2016:25) merupakan penelitian yang menekankan pada *quality* (kualitas) atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pengembangan konsep teori.

Deskriptif menurut Danandjaja (2012:29) merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sesuatu masalah aktual, tanpa menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Kebanyakan dari jenis penelitian ini mencoba melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati.

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: Pertama, penelitian ini sangat membutuhkan masukan serta saran yang dapat diwawancarakan. Alasan yang kedua, permasalahan ini untuk mengetahui sudah berjalan dengan maksimal implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang merupakan hal baru yang diterapkan, maka hal ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual.

## **B. Fokus Penelitian**

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Pada dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2014:93) dalam penelitian kualitatif, masalah diistilahkan dengan fokus penelitian yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, fokus penelitian perlu diterapkan guna membatasi penelitian dan berfungsi pula untuk memenuhi suatu informasi yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan menggunakan model implementasi Goerge C Edward III, karena keempat variabelnya beroperasi atau bersifat merintang implementasi kebijakan. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat peran keempat faktor tersebut dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

1. Komunikasi, antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi dan pelatihan-pelatihan
  - b. Komunikasi berdasarkan dengan tujuan *billing system* yakni tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
2. Sumber-Daya:
  - a. SDM (Sumber Daya Manusia)
  - b. Fasilitas yang disediakan (sarana-prasarana)
3. Disposisi, komitmen, watak para pelaksana dalam merespon program untuk mencapai sasaran keberhasilan program.
4. Struktur birokrasi, yaitu karakteristik, SOP (*Standard Operating Procedures*) norma-norma, dan pola-pola dalam menjalankan kebijakan.

### **C. Informan**

Informan pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan metode sampling purposive. Sampling purposive atau yang dalam istilah Herdiansyah (2010:106) disebut dengan purposeful sampling, merupakan teknik penentuan sampel dengan didasarkan pada kesamaan antara ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek penelitian dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, terkait penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

**Tabel 5. Informan**

No.	Nama	Jabatan/Profesi
1	Sugiarti	Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2	Sri Ermalia	Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
3	Yunihartono	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
4	Sodikin	Distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Pringsewu (CV. Bumi Subur)
5	H. Hibun	Kios/Pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
6	Kusnadi	Ketua Gapoktan Pekon Bulurejo
7	Agus Rundoko	Ketua Gapoktan Pekon Tegalsari
8	Sarningsih, SP	Penyuluh Pertanian Kecamatan Gadingrejo

#### D. Jenis Data

Pengertian data sendiri merupakan suatu catatan dari kumpulan fakta yang ada, yang dapat berbentuk kata, angka, maupun lainnya. Jenis-jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini ialah:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Adapun data primer yang didapat dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan, wawancara ini dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data seperti dokumen-dokumen tertulis berupa Peraturan Gubernur Nomor 99 tahun 2016 Tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung, serta data yang juga didapat dari berbagai macam media elektronik maupun cetak yang ada hubungannya dengan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh berbagai data tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisisnya. Dalam pendekatan kualitatif untuk melakukan sebuah penelitian, analisis dapat dimulai sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis tersebut cenderung tentatif dan tidak lengkap, karena data yang terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi yang *valid* dan *representatif* untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan meliputi:

## 1. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode obseravasi. Metode wawancara menurut Irawan (Fuad dan Nugroho, 2016:61) merupakan suatu alat pengumpulan data yang digunakan dalam instrumen lainnya. Tetapi sebagai metode wawancara merupakan satu-satunya alat yang diperlukan berpusat pada informan (responden). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*in depth interview*). Ada tiga jenis wawancara menurut Ghony dan Almanshur (2016:176) yaitu:

### a. Wawancara terstruktur

Jenis wawancara ini kerap kali disebut sebagai suatu wawancara “terfokus”.

### b. Wawancara tak terstruktur

Wawancara ini mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri informan.

### c. Wawancara terbuka terstandar

Teknik pengumpulan data wawancara terbuka ini penerapannya pada evaluasi program.

Peneliti menyusun poin-poin pokok yang akan ditanyakan kepada narasumber agar dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait permasalahan mengenai implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* ini sudah berjalan dengan maksimal atau belum, sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan.

## 2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut (Siregar, 2012:124). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk mendapatkan informasi lebih banyak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berkaitan dengan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system*.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Fuad dan Nugroho (2016:61) merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Sumber data pada penelitian ini yaitu Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut Efendi, Tukiran dan Sucipto (Singarimbun, 1995:240) terdiri dari:

### 1. Editing Data

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya, dalam proses ini peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan EYD. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

## 2. Interpretasi data

Interpretasi data menurut Efendi, Tukiran dan Sucipto (Singarimbun, 1995: 240), pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Ghony dan Almanshur (2016:246) dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga akhir penelitian (pengumpulan data). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Data kualitatif yang berupa data dalam bentuk foto, kata-kata, tindakan peneliti dan peristiwa di kehidupan sosial.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari

hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

Sugiyono dalam Ghony dan Almanshur (2016:308) menjelaskan bahwa dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan penelitian yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah terletak pada temuan, oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dilihat aneh, asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan titik perhatian dalam melakukan reduksi data.

Peneliti mengumpulkan data implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan pertanyaan yang sama tiap kriteria informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif.

Penyajian data menurut Ghony dan Almanshur (2016:308) merupakan sekumpulan yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut. Adapun penyajian yang baik merupakan suatu cara yang pokok bagi analisis kualitatif yang valid.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk table dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah

melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Menurut Ghony dan Almanshur (2016:309) proses yang terakhir ini, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, polapola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebabakibat, dan proposisi. Bagi peneliti yang berkompeten akan mampu menangani kesimpulan tersebut secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian. Proses reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Data dianalisis dan diperiksa keabsahannya untuk disimpulkan.

## H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan Peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2012:274). Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi data.

Triangulasi data dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mencocokkan data yang didapat melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan seluruh informan pihak kemudian di analisis dan dicocokkan dengan data-data yang didapat melalui dokumentasi. Melalui triangulasi data, maka diperoleh informasi yang valid dan jelas mengenai implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu**

##### **a. Kondisi Geografis**

Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu terletak 37 kilometer sebelah barat Bandar Lampung, ibukota Provinsi Lampung. Berdasarkan Pringsewu dalam Angka (2013), secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak pada  $104^{\circ}45'25''$  -  $105^{\circ}8'42''$  Bujur Timur (BT) dan  $5^{\circ}8'10''$ -  $5^{\circ}34'27''$  Lintang Selatan (LS). Berdasarkan letak administrasi, wilayah ini berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten. Adapun batas administratif dari Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.

- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh menteri dalam negeri. Secara Administratif berdasarkan UU Pembentukan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pringsewu terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pagelaran, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas dan Adi Luwih.

## b. Kondisi Topografi

### 1. Kemiringan Lahan

Sekitar 41,79% wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar (0-8%) yang tersebar di Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gading Rejo dan Sukoharjo. Untuk lereng berombak (8-15%) memiliki sebaran luasan sekitar 19,09% yang dominan terdapat di Kecamatan Adiluwih. Sementara kelerengan yang terjal (>25%) memiliki sebaran luasan sekitar 21,49% terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka.

### 2. Ketinggian Lahan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada ketinggian 100–200 meter dpl, hal itu dapat dilihat dari porsi luasan yang merupakan luasan terbesar yaitu 40.555,25 Ha atau

sebesar 64,88% dari total wilayah Kabupaten Pringsewu. Wilayah dengan ketinggian 100–200 meter sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Pagelaran, sedangkan kelas ketinggian lahan tertinggi > 400 meter dpl dengan porsi luasan terkecil atau sebesar 5,99% terdapat di Kecamatan Pardasuka dengan luasan sebesar 2.640,40 Ha atau 27,86% dari total luas wilayahnya dan Kecamatan Pagelaran dengan luasan sebesar 1.106,72 Ha atau 6,40% dari total luas wilayahnya.

#### c. Potensi Pertanian

Struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu didominasi oleh sektor pertanian dengan komoditas yang dominan adalah padi sawah dan padi ladang, padi organik, jagung dan juga komoditas sayur mayur serta ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah dan juga kacang hijau. Total luas areal pertanian untuk padi organik di Kabupaten Pringsewu adalah 193 Ha dengan produksi rata-rata sekitar 770 ton/tahun. Sentra padi organik terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Gadingrejo, yang sebagian besar dikembangkan dengan menggunakan pupuk kompos dan pestisida nabati sehingga memiliki cita rasa dan harga jual lebih tinggi sekitar 30-40% dibandingkan dengan padi pada umumnya.

Potensi ini dapat dikembangkan dengan adanya lahan yang tersedia dan SDM petani yang ada, serta terbukanya peluang pengembangan industri penggilingan beras. Kabupaten Pringsewu

memiliki ketersediaan lahan yang luas dan subur sehingga sangat potensial untuk pengembangan tanaman palawija seperti, tomat, cabe, sayur mayur dan tanaman palawija lainnya. Komoditas tanaman palawija ini, menjadi komoditas yang cukup handal yang pemasarannya tidak saja di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung, tetapi telah merambah keluar Provinsi Lampung, seperti Jakarta dan Palembang.

Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2018, jumlah usaha pertanian di Kabupaten Pringsewu sebanyak dua usaha dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak dua usaha dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. Pagelaran, Gadingrejo, dan Sukoharjo merupakan tiga kecamatan dengan urutan teratas yang mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu masing-masing 11.051 rumah tangga, 9.616 rumah tangga, dan 7.012 rumah tangga.

Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian selain perusahaan dan rumah tangga di Kabupaten Pringsewu untuk perusahaan sebanyak dua unit dan lainnya dua unit. Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum berlokasi di Kecamatan Gadingrejo yaitu sebanyak satu perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga

usaha pertanian terdapat di Kecamatan Pardasuka, yaitu sebanyak dua unit.

#### d. Penggunaan Lahan

Total luas wilayah Kabupaten Pringsewu adalah seluas 62.510 Ha, dengan penggunaan lahan yang beraneka ragam. Penggunaan lahan di Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi empat, lahan sawah, lahan kering, lahan perkebunan, dan lainnya yang rinciannya dapat di lihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pringsewu**

No.	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)			
		Sawah	Lahan Kering	Perkebunan	Lainnya
1	Pardasuka	2.484	1.041	1.292	4.693
2	Ambarawa	1.390	1.044	-	665
3	Pagelaran	1.384	3.198	4.878	7.816
4	Pringsewu	2.192	1.372	183	1.581
5	Gadingrejo	2.556	2.138	1.654	2.223
6	Sukoharjo	1.020	1.446	2.589	2.239
7	Banyumas	320	1.483	1.392	791
8	Adiluwih	850	5.505	-	1.127
Jumlah		12.196	17.227	11.988	21.135

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu 2018

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah lahan kering yaitu seluas 17.227 hektar. Seluas 12.196 hektar lahan di Kabupaten Pringsewu digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya digunakan sebagai lahan perkebunan seluas 11.988 hektar, lainnya seluas 21.135 hektar yaitu hutan dan non pertanian.

## 2. Gambaran Umum Kecamatan Gadingrejo

### a. Kondisi Geografis

Kecamatan Gadingrejo merupakan kecamatan yang terletak di bagian paling timur Kabupaten Pringsewu, berjarak  $\pm$  15 km dari ibukota kabupaten. Terletak pada  $104^{\circ}$ - $105^{\circ}$  Bujur Timur dan  $05^{\circ}$  Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah 5.276 ha yang terdiri dari 23 pekon dengan jumlah penduduk sebanyak 73.964 jiwa, yaitu laki-laki sebanyak 37.733 jiwa dan perempuan sebanyak 36.729 jiwa. Keadaan tanah di kecamatan ini berupa daratan, pegunungan, bukit, sawah, sungai dan danau serta rawa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Sukoharjo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Way Lima
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gedongtataan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu

### b. Kondisi Topografi dan Tanah

Kecamatan Gadingrejo mempunyai kawasan yang berada pada ketinggian  $<$  400 meter dpl (diatas permukaan laut), sedangkan untuk kawasan perkotaan Gadingrejo berada pada ketinggian 200 meter dpl. Bentuk topografi Kecamatan Gadingrejo berdasarkan kemiringan lereng lahannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga)

bagian yang bervariasi yaitu mulai dari kelas lereng 0, 13%, dan 25%. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode interpolasi dapat diketahui wilayah yang terjal terdapat di bagian Selatan yaitu Pekon Wates, sedangkan wilayah yang mempunyai kondisi lahan yang cukup datar umumnya tersebar di bagian tengah wilayah kecamatan.

Jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Gadingrejo terdiri dari 3 (tiga) jenis tanah yaitu: 1) gleisol distrik; 2) kambisol distrik; 3) podsolik kandik. Kawasan ini dilalui 3 (tiga) aliran sungai, yaitu Sungai Way Bulok Karto, Way Tebu dan Way Semah. Sungai-sungai tersebut digunakan oleh warga untuk irigasi dan pemandian hewan ternak.

c. Kondisi Penduduk dan Lahan

Penduduk di Kecamatan Gadingrejo mayoritas beragama Islam dengan jumlah 77.221 orang, beragama Kristen sebanyak 244 orang, beragama Khatolik sebanyak 234 orang, beragama Hindu sebanyak 660 orang, dan beragama Budha sebanyak 21 orang yang tersebar di 23 pekon. Sebaran luas lahan Kecamatan Gadingrejo berdasarkan jumlah pekon tersaji pada Tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7. Luas Kecamatan Gadingrejo menurut Pekon**

No.	Nama Pekon	Luas Wilayah (Ha)
1	Parerejo	381
2	Blitarejo	374
3	Bulukarto	250
4	Panjerejo	323
5	Wates	194
6	Tambahrejo	251
7	Wonodadi	370
8	Gadingrejo	402
9	Tegalsari	350
10	Tulung Agung	625
11	Bulurejo	239
12	Yogyakarta	127
13	Kediri	200
14	Mataram	238
15	Wonosari	266
16	Klaten	101
17	Wates Timur	172
18	Wates Selatan	84
19	Gadingrejo Timur	115
20	Gadingrejo Utara	240
21	Gadingrejo Barat	103
22	Wonodadi Utara	134
23	Yogyakarta Selatan	117
Jumlah		5.658

Sumber: Profil Kecamatan Gadingrejo 2018

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan menggunakan model implementasi Goerge C Edward III, karena keempat variabelnya beroperasi atau bersifat merintang implementasi kebijakan. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat peran keempat faktor tersebut dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

##### 1. Komunikasi

###### a. Sosialisasi dan pelatihan

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu telah melakukan sosialisasi mengenai Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui *Billing System*. Kegiatan ini merupakan kolaborasi stakeholder bidang pertanian yaitu Dinas Pertanian melalui Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan, bersama Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Pengecer Pupuk.

- b. Komunikasi berdasarkan dengan tujuan *billing system* yakni tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Pencapaian 6T pada distribusi pupuk subsidi melalui *billing system* berdasarkan Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Harga sudah cukup baik. Namun, berdasarkan kriteria tepat waktu, *billing system* belum cukup baik karena terkadang pupuk baru sampai ketika masa tanam hampir habis, bahkan ketika masa tanam sudah habis. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada pencapaian hasil pertanian.

## 2. Sumber daya

- a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia di kecamatan Gadingrejo sudah cukup dan memadai meliputi jumlah staff dan keahlian dari pelaksana dalam melaksanakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system*.

- b. Fasilitas yang disediakan

Pemerintah telah mengupayakan ketersediaan fasilitas dalam distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system*, diantaranya adalah fasilitas komputer tersedia di kelompok tani, fasilitas internet untuk terhubung ke sistem *online*.

3. Disposisi, komitmen, watak para pelaksana dalam merespon program untuk mencapai sasaran keberhasilan program sudah baik karena semangat dan kemauan para pelaksana untuk mendorong distribusi pupuk bersubsidi yang 6 tepat.
4. Struktur birokrasi, yaitu karakteristik, SOP (*Standard Operating Procedures*) norma-norma, dan pola-pola dalam menjalankan kebijakan. SOP yang dilakukan oleh pemerintah Dalam menjalankan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* ini, pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang menjadi landasan dalam penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019. Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2019 dimaksudkan agar menjadi acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak yang terkait dalam pengawalan terhadap pengadaan, penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **B. Saran**

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi mengenai distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* untuk mendukung pencapaian 6 tepat.
2. Sebaiknya dilakukan perbaikan dari segi ketepatan waktu agar dapat mendukung pencapaian sasaran distribusi pupuk bersubsidi melalui *billing system* dengan 6T.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo. Yogyakarta.
- Danandjaja. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial: Disertai Aplikasi SPSS for Windows*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Fuad, Anis dan Nugroho, Kandung Sapto. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ghony, M Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Hariyoso. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Peradaban. Yogyakarta.
- Hasyim, Harris. 2005. *Pengembangan Kemitraan Agribisnis: Konsep, Teori & Realita dalam Ekonomi Biaya Transaksi*. Pusat Penerbitan Lembaga Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Kotler, Philip. 2007. *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, Pengendalian*. Salemba Empat. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Pustaka LP3ES. Yogyakarta.
- Siregar, S. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kentana Prenada Media Group. Jakarta.

Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press. Yogyakarta.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung.

### **Jurnal dan Skripsi:**

Daryanto, A. 2014. *Jurnal Posisi Daya Saing Pertanian Indonesia dan Upaya Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani*.

Darwis dan Nurmanaf. 2014. *Jurnal Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga, dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani*.

Citraningsih, Erlin. 2015. *Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pola Tertutup pada Lini IV di Kelompok Tana Sumber Rejeki, Desa Glundongan Kabupaten Jember*

Fajarmulia. 2016. *Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember*.

Gunawan, Endro. 2016. *Presepsi Petani dalam Implementasi Program Kartu Tani untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi*

Gustriani, Yuni Asih. 2018. *Implementasi Program Subsidi Langsung Pupuk (SPL) bagi Petani di Kecamatan Sekarbla Kota Mataram* .

Saputra, Riyan. 2016. *Implementasi Program Pendamping Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan(di Desa Bukit Kecamatan Pelaman Kabupaten Sorolagun Provinsi Jambi*.

### **Sumber lain:**

Berita24.id. <http://berita24.id/berita/memasuki-musim-tanam-para-petani-keluhkan-kelangkaan-pupuk/> diakses pada tanggal 28 Januari 2019

Lampung.antarane.ws. <http://lampung.antarane.ws/berita/287682/hkti-lampung-pertanyakan-kelangkaan-pupuk-bersubsidi/> diakses pada 28 April 2018.

Republika. <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/04/19/nasional/daerah/17/09/14/ow8xek382-lampung-salurkan-pupuk-bersubsidi-lewat-sistem-online> diakses pada 28 April 2018.